

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, *INTERGOVERNMENTAL*
REVENUE DAN KEKAYAAN DAERAH TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH(LKPD)
(Studi pada Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
di Propinsi Riau Tahun 2009-2014)**

**Oleh :
Dhaulika Hidayah
Pembimbing : Yusralaini dan Al- Azhar A**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru. Indonesia
Email : likahidayah2510@gmail.com*

*The Effect Of Independence Of The Region, Intergovernmental Revenue And
Regional Wealth On Level of Financial Statement Disclosures
(Study at Local Government Financial Report in Riau Province
On 2009-2014)*

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the influence of independence of The region, intergovernmental revenue and regional wealth on level of financial statement disclosures. The population in this study are all local government financial report in Riau Province from 2009 to 2014. The number of samples are processed as many as 53 local government financial report listed in Riau Province from 2009-2014. Data analysis technique used is multiple regression analysis were processed with SPSS Windows 19. The results show that independence of the region, intergovernmental revenue, and regional wealth have significant towards financial statement disclosures. Each of them have significant (0.022), (0.007), (0.011) less than (0.05). Overall, it is known that independence of The region, intergovernmental revenue and regional wealth has an effect on the level of financial statement disclosures of 31.6 %. While 68.4% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords : Independence, Intergovernmental, Wealth, Disclosures

PENDAHULUAN

Reformasi keuangan dan otonomi daerah akan mengubah iklim pelaksanaan pemerintah daerah dan akan menuju pada bentuk tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah sebagai

pihak yang diberi tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya merupakan upaya konkrit mewujudkan *good governance*.

Pemerintah dituntut mampu mengurus pemerintahannya sesuai

dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Berdasarkan undang-undang No.17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap pemerintah daerah berhak untuk menyampaikan laporan pertanggung jawabannya berupa laporan keuangan.

Dalam rangka pengungkapan laporan keuangan yang dimaksud, pemerintah harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel.

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah merupakan suatu bentuk mekanisme pertanggung jawaban sekaligus dasar untuk mengambil keputusan bagi pihak eksternal, sehingga laporan keuangan harus diaudit dan dilampiri dengan pengungkapan. Pengungkapan dalam laporan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (Mandatory Disclosure) dan pengungkapan sukrela (Voluntary Disclosure).

Pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh SAP adalah pengungkapan yang bersifat wajib yang merupakan informasi wajib dan dikemukakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter, pengungkapan wajib merupakan bagian dari SAP yang merujuk pada transparansi dan akuntabilitas publik.

Di Indonesia masih sangat rendah tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Terbukti karena masih banyaknya Kabupaten/Kota di Indonesia yang masih mendapatkan opini WDP karena informasi dalam LKPD nya yang tidak lengkap.

Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan

masih ditemukannya hasil pemeriksaan pada Kota/Kabupaten di Provinsi Riau pada tahun 2009-2014 yang memperoleh opini WDP. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota/Kabupaten belum mampu menyajikan laporan keuangan dengan memenuhi standar akuntansi pemerintah. Salah satu penyebab pemerintah mendapatkan opini WDP juga dikarenakan bahwa pemerintah Kota/Kabupaten tidak mengungkapkan seluruh informasi yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satunya adalah kemandirian daerah. Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2008).

Hubungan kemandirian daerah dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan adalah kemandirian daerah merupakan alat untuk menganalisis keberhasilan keuangan pemerintah daerah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi berhasil mengelola tatanan pemerintahannya, yang artinya jumlah pendapatan asli daerahnya lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatannya yang diterima dari pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi dinilai oleh pemerintah pusat baik dalam mengelola sumber daya secara

optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa adanya dana bantuan dari pusat.

Keberhasilan pengelolaan sumber daya menjadi pendapatan asli daerah mampu menarik adanya investasi yang berguna bagi pemerintah daerah dalam pembangunan daerah maupun perbaikan infrastruktur. Salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kemandirian daerah adalah rasio kemandirian daerah. Kemandirian daerah dapat dilihat dari perbandingan anatar PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan total pendapatan daerah (Nordiawan, 2010:78)

Penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2010) dan Liestiani (2012), menemukan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, selain itu penelitian dengan judul pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan LKPD yang diteliti oleh Syarifah (2013) menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Namun hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Hilmi (2011) dan Heri (2015) yang tidak menemukan pengaruh antara kemandirian daerah dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor lainnya adalah *Intergovernmental Revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Intergovernmental Revenue* adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program daerah (Sumarjo, 2010). *Intergovernmental*

Revenue merupakan salah satu jenis pendapatan daerah yang berasal dari transferan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi (Lesmana, 2010). Pemerintah daerah membelanjakan pendapatan transfer antar pemerintah sesuai alokasi dan petunjuk anggaran menurut undang-undang. Pendapatan transfer adalah jenis pendapatan daerah yang informasi mengenai jumlahnya dapat diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran.

Pemerintah daerah dengan *intergovernmental revenue* yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat akan semakin tinggi, karena pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan transparansi dana yang diterima untuk memperoleh kepercayaan pemerintah pusat dan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmastuti (2010) menemukan adanya pengaruh positif antara *Intergovernmental Revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan penelitian yang dilakukan oleh Syafitri (2013) menyatakan bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syafitri (2012) dan Leni (2013) menyatakan bahwa *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Variabel lainnya yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah

adalah kekayaan pemerintah daerah. Kekayaan pemerintah daerah diprosikan dengan pendapatan asli daerah (PAD). PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan (Baswir, 2008:31). Pendapatan asli daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan, karena pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, karena besarnya kekayaan pemerintah daerah menggambarkan tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, dan menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali potensi daerahnya, hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya agar transparan dan akuntabel. Hal ini merupakan tuntutan bagi pemerintah daerah untuk dapat dinilai bagi pemerintah pusat maupun publik sejauh mana pemerintah daerah berhasil menggali segala potensi yang ada pada daerah. Selain itu, daerah dengan tingkat kekayaan yang tinggi merupakan salah satu wujud peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif yang bisa dimanfaatkan

untuk mendorong adanya investasi di daerah tersebut.

Menurut penelitian Lasward(2005) menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, hasil perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto (2010) dan Khasanah (2014) menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Leni Kania Syarifah dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul “ Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010.”

Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah 1). Apakah kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah?. 2) Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?. 3) Apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui pengaruh dari kemandirian daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah 2) Mengetahui pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah 3) Mengetahui pengaruh dari kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pengungkapan laporan keuangan daerah dalam catatan atas laporan keuangan

Pengungkapan (disclosure) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberi informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Chariri dan Ghozali, 2007)

Dalam memutuskan informasi apa yang akan disajikan, praktik yang umum adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai (Simbolon, 2010). Prinsip ini yang sering disebut dengan pengungkapan penuh (full disclosure) yang mengakui bahwa sikap dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan mencerminkan serangkaian *trade off* penilaian. *Trade off* ini terjadi antara (1) kebutuhan untuk mengungkapkan secara cukup terinci hal-hal yang akan mempengaruhi keputusan pemakai, dengan (2) kebutuhan untuk memadatkan penyajian agar informasi dapat dipahami (Simbolon, 2010).

Pengungkapan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (Chariri dan Ghozali, 2007:46) pengungkapan Wajib dan pengungkapan Sukarela. Di Indonesia pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan ditetapkan oleh BAPEPAM dalam surat edaran No.SE-02/PM/2002. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan suatu panduan penyajian dan pengungkapan yang terstandarisasi dengan mendasarkan

pada prinsip-prinsip pengungkapan penuh (*Full Disclosure*), sehingga dapat memberikan kualitas informasi keuangan bagi para pengguna.

Kemandirian Daerah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa, “Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi.” Menurut Abdul Halim (2008) kemandirian keuangan daerah artinya daerah harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya

Hessel Nogi (2007:89-92) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dipenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Intergovernmental revenue

Intergovernmental revenue biasa dikenal sebagai dana perimbangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008, dalam rangka

pelaksanaa desentralisasi, kepada daerah diberikan dana merimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip money follows function. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Pada penelitian ini *intergovernmental revenue* diukur dengan dana alokasi umum.

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Permendagri No. 59 tahun 2007, cara menghitung Dana alokasi Umum adalah DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan APBN, DAU untuk propinsi adalah 10%, sedangkan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sebesar 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas, DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan hasil perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan persinya.

Kekayaan daerah

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut UU nomor 28 tahun 2009 yaitu suatu keuangan daerah

yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah.

Pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian daerah yang tinggi menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi daerahnya untuk dijadikan sumber daya, sehingga pemerintah daerah tidak bergantung hanya pada sejumlah dana transferan yang diterima dari pemerintah pusat. Dan hal ini tentu saja mendapatkan pandangan positif dari pemerintah pusat terhadap kinerja dari pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian daerah yang tinggi, serta mendorong adanya investasi di daerah tersebut karena keberhasilannya dalam mengelola segala sumber yang bisa dijadikan pendapatan asli daerah (Mahmudi, 2007:14).

Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Heri Atapson Girsang (2012) dan Leni Kania Syarifah (2010) menunjukkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh kemandirian daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah, hipotesis yang akan diuji adalah

Ha1 : Diduga kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan daerah

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah dengan *intergovernmental revenue* yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat untuk membiayai program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi akan menuntut pengungkapan yang cukup lengkap dengan informasi pendukung sebagai upaya untuk memonitor kinerja pemerintah Daerah atas penggunaan dana transfer. Sehingga pemerintah daerah akan didorong untuk meningkatkan transparansi dana yang diterima dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat dan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmastuti (2010) dan Febriyani (2013) menemukan adanya pengaruh antara *intergovernmental revenue* dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, yang masing-masing menunjukkan pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah,, hipotesis yang akan diuji adalah :

Ha2 : *Diduga intergovernmental revenue berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah*

Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah dengan tingkat kekayaan daerah yang tinggi akan menuntut pemerintah dalam mengungkapkan informasi yang lengkap karena dengan adanya pengungkapan tersebut pemerintah daerah akan mendapatkan kepercayaan dan apresiasi oleh pemerintah pusat maupun masyarakat atas keberhasilannya dalam pengelolaannya menggali sumber daya atau hal lain yang menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Syafitri (2012), kekayaan Pemerintah Daerah berhubungan positif dengan peningkatan pengungkapan karena memberikan sinyal mengenai kualitas kepala daerah, dimana kepala daerah dapat mengambil manfaat dengan meningkatkan kesempatan mereka untuk dipilih kembali dan mengurangi biaya kepentingan. Begitu juga dengan penelitian Liestiani (2008) dan Hilmi (2010) yang menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara kekayaan daerah dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah.

Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah, hipotesis yang akan diuji adalah :

Ha3 : *Diduga kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah*

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan

keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota di Propinsi Riau

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *Purpoive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjek peneliti, sampel dipilih berdasarkan pada kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan agar diperoleh sampel yang representative. Kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel secara *purposive sampling* dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Sekaran (2010) yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau pada tahun 2009-2014 yang telah diaudit oleh BPK.
2. Pemerintah Daerah tersebut memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangannya.

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel diatas, laporan keuangan daerah yang dapat dijadikan sampel adalah 53LKPD.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data sekunder

diperoleh dari LKPD selama kurun waktu 2009-2014.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Metode studi pustaka yaitu dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai literature.
2. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan uji t. Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara individual.

Variabel Dependen

Variabel dependen yang diteliti pada penelitian ini adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah adalah perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam LKPD Pemerintah Daerah dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus (Mardiasmo, 2007:88) :

$$\frac{\text{Pengungkapan dalam LKPD}}{\text{Pengungkapan dalam PSAP}}$$

Variabel Independen

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kemandirian daerah (X1) Abdul Halim (2008:232) mengemukakan bahwa, "Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Berikut ini adalah cara mengukur kemandirian daerah (Nordiawan, 2010:78) :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Total Pendapat Transfer} + \text{Total Kewajiban})}$$

Intergovernmental revenue (X2). Intergovernmental Revenue adalah jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Dalam penelitian ini membandingkan total pendapatan dalam mengukur Intergovernmental Revenue dengan rumus yang digunakan oleh Widodo (Widodo, 2010:261) :

$$\text{IRGOV} = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Kekayaan daerah (X3). Kekayaan pemerintah daerah atau disebut juga dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian sebelumnya, Syafitri(2012) menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tolak ukur dalam kekayaan daerah yang ditransformasikan dalam bentuk Logaritma sebagai proksi untuk mengukur kekayaan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran kondisi data yang digunakan untuk setiap variabel.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviasi
Kemandirian Daerah	53	.012	.3954	.1014	.09103
Intergovernmental Revenue	53	.601	.9474	.8320	.07641
Kekayaan Daerah	53	4.04	5.748	4.799	.41687
Tingkat Pengungkapan	53	.627	1.000	.9060	.08866
Valid N (listwise)	53	91	00	989	803

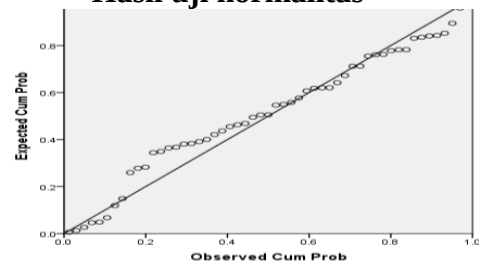
Sumber : Data Olahan, 2017.

HASIL UJI KUALITAS DATA

Hasil Uji Normalitas

Dengan menggunakan *Normal P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 1
Hasil uji normalitas



Sumber : Data Olahan, 2017.

Dengan melihat tampilan grafik normal P-Plot diatas dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikut arah garis diagonal. Grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Apabila nilai $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,10$ berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel kemandirian daerah, intergovernmental revenue, dan kekayaan daerah secara berturut-turut adalah (1.135 , 1.192 , 1.333) < 10 dan tolerance (0.881, 0.839, 0.750) $> 0,10$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$.

Tabel 2
Hasil Uji Autokorelasi

Nilai dW	Nilai dL	Nilai dU	4-dl	4-du	Kesimpulan
2,150	1,4339	1,679	2,5661	2,321	Tidak Mengandung Autokorelasi

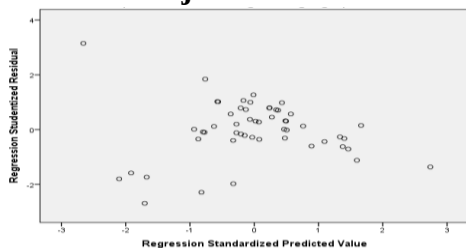
Sumber : Data Olahan, 2017.

Berdasarkan tabel Durbin-Watson diatas diketahui bahwa nilai Durbin-Watson hitung sebesar 2,214 Apabila dibandingkan dengan nilai Durbin-Watson tabel pada tingkat signifikan 5%, dengan $k = 3$ dan $n = 53$ maka diperoleh $dl = 1,4339$ dan $du = 1,679$, maka nilai $4-du = 2,321$ dan nilai $4-dl = 2,5661$. Hasil dari Durbin-Watson hitung sebesar 2,150 dan nilai ini berada diposisi antara du (1,679) dan $4-dU$ (2,321), yang artinya bahwa tidak adanya gejala autokorelasi dalam model regresi ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gejala heteroskedastisitas dideteksi dengan menggunakan grafik *scatterplot*.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2017.

Dari gambar Scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat diartikan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009 : 125).

Koefisien Determinasi

Digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 3
Pengujian Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.562 ^a	.316	.274	.07555924	2.150

Sumber : Data Olahan, 2017.

Nilai koefisien *R square* yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0.316 yang artinya adalah 31,6% variabel dependen (tingkat pengungkapan) dijelaskan oleh variabel independen (kemandirian daerah, intergovernmental revenue dan kekayaan daerah), dan sisanya sebesar 68,4 % dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan.

HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA

Hasil analisis regresi hipotesis pertama dengan metode enter untuk model analisis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.157	.218		.721	.474
1 Kemandirian Daerah	.291	.123	.299	2.372	.022
Intergovernmental Revenue	.424	.150	.366	2.833	.007
Kekayaan Daerah	.076	.029	.359	2.631	.011

Sumber : Data Olahan, 2017.

Diketahui nilai t table pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed). Pengujian dua arah dilakukan karena hipotesis dalam penelitian ini belum jelas arah pengaruhnya (positif atau negatif). Oleh karena itu didapat persamaan sebagai berikut:

$$t_{\text{tabel}} = n - k - 1: \alpha / 2 \\ = 53 - 3 - 1: 0,05 / 2 \\ = 49 : 0,025 \\ = 2,010.$$

keterangan: n : jumlah sampel
k : jumlah variabel bebas
1 : konstan

1. Kemandirian daerah. Diketahui t hitung (2,372) > t tabel (2,010) atau Sig. (0,022) < 0,05. Artinya kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan dengan arah positif.
2. Intergovernmental revenue. Diketahui t hitung (2,833) > t tabel (2,010) atau Sig. (0,007) < 0,05. Artinya intergovernmental revenue signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan dengan arah positif.
3. Kekayaan daerah. Diketahui t hitung (2,631) > t tabel (2,010) atau Sig. (0,011) < 0,05. Artinya kekayaan daerah berpengaruh

signifikan terhadap tingkat pengungkapan dengan arah positif.

Secara matematis untuk menjawab hipotesis yang ada dapat ditunjukkan dengan persamaan di bawah ini:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Tingkat Pengungkapan = 0,157 +
0,291 Kemandirian Daerah + 0,424
Intergovernmental Revenue + 0,076
Kekayaan Daerah + e

Arti angka-angka dalam persamaan Regresi di atas:

- Nilai konstanta (a) sebesar 0,157. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka tingkat pengungkapan sebesar 0,157.
- Nilai koefisien regresi variabel kemandirian daerah sebesar 0,291. Artinya adalah bahwa setiap meningkatnya kemandirian daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan tingkat pengungkapan sebesar 0,291 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel intergovernmental revenue sebesar 0,424. Artinya adalah bahwa setiap meningkatnya intergovernmental revenue sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan tingkat pengungkapan sebesar 0,424 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel kekayaan daerah sebesar 0,076. Artinya adalah bahwa setiap meningkatnya kekayaan daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan tingkat pengungkapan sebesar 0,076 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Standar error (e) merupakan

variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukan dalam persamaan.

Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (Kemandirian Daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 3 didapat nilai t_{hitung} senilai 2.372. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 2.372 > t_{tabel} 2.010$. Maka dapat disimpulkan **H₁ diterima** yaitu kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Sementara itu, dalam tabel 4.5 didapat P value 0.022. yang berarti P value $0.022 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa kemandirian daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan.

Pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah yang tinggi juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakatnya dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang baik. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka pemerintah daerah cenderung untuk berusaha melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya untuk mendapatkan penilaian yang baik pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2010) yang mengungkapkan bahwa kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh

positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi pula pengungkapan yang dilakukan dalam LKPD. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik memaksa pemerintah daerah mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah dipakai kepada masyarakat sebagai objek pajak. Dan hal ini tentu saja mendapatkan pandangan positif dari pemerintah pusat terhadap kinerja dari pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian daerah yang tinggi, oleh karena itu pemerintah daerah cenderung untuk berusaha melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya untuk memperoleh citra yang baik.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (Intergovernmental revenue berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 3 didapat nilai t_{hitung} senilai 2.833. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 2.833 > t_{tabel} 2.010$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa intergovernmental revenue berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Maka dapat disimpulkan **H₂ diterima** yaitu intergovernmental revenue berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Sementara itu, dalam tabel 4.4 didapat P value 0.007 yang berarti P value $0.007 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa intergovernmental revenue berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan.

Pemerintah daerah dengan intergovernmental revenue yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat untuk membiayai program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi akan menuntut pengungkapan yang cukup lengkap dengan informasi pendukung sebagai upaya untuk memonitor kinerja pemerintah Daerah atas penggunaan dana transfer. Sehingga pemerintah daerah akan didorong untuk meningkatkan transparansi dana yang diterima dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat dan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) mengungkapkan bahwa intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Semakin besar nilai intergovernmental revenue maka akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban karena sumber dana berasal dari pihak eksternal.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (Kekayaan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.4 didapat nilai t_{hitung} senilai 2.631 Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 2.631 > t_{tabel} 2.010$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa kekayaan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Maka

dapat disimpulkan **H₃ diterima** yaitu kekayaan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Sementara itu, dalam tabel 4.4 didapat P value 0.011 yang berarti P value $0.011 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan.

Pemerintah daerah dengan tingkat kekayaan daerah yang tinggi akan menuntut pemerintah dalam mengungkapkan informasi yang lengkap karena dengan adanya pengungkapan tersebut pemerintah daerah akan mendapatkan kepercayaan dan apresiasi oleh pemerintah pusat maupun masyarakat atas keberhasilannya dalam pengelolaannya menggali sumber daya atau hal lain yang menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafitri (2012) yang menemukan bahwa kekayaan Pemerintah Daerah berhubungan positif dengan peningkatan pengungkapan karena memberikan sinyal mengenai kualitas kepala daerah, dimana kepala daerah dapat mengambil manfaat dengan meningkatkan kesempatan mereka untuk dipilih kembali dan mengurangi biaya kepentingan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan penelitian adalah:

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan

keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggirasio kemandirian keuangan daerah maka pemerintah daerah cenderung untukberusaha melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya untuk mendapatkain penilaian yang baik.

2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan intergovernmental revenue berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin besar nilai intergovernmental revenue maka akan mendoronng pemerintah untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban karena sumber dana berasal dari pihak eksternal.
3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Hal ini berarti Pemerintah daerah dengan tingkat kekayaan daerah yang tinggi akan menuntut pemerintah dalam mengungkapkan informasi yang lengkap karena dengan adanya pengungkapan tersebut pemerintah daerah akan mendapatkan kepercayaan dan apresiasi oleh pemerintah pusat maupun masyarakat

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca, peneliti selanjutnya adalah :

1. Pada penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah sampel berupa laporan keuangan provinsi lain, seperti provinsi Sumatera Barat, Sumatea Utara dan lain-lainnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh tingkat pengungkapan, seperti size (ukuran daerah), diferensial fungsional atau karakteristik pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrison, 2008, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi 3. BPFE. Yogyakarta
- Darmastuti, D dan S Dyah. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2009*. Simposium Nasional AkuntansiXV Banjarmasin.
- Ghozali dan Chairiri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing (dasar-dasar audit laporan keuangan)*. UUP STIM.
- Hery. (2009). *Teori Akuntansi*. Jakarta : Kencana.

- Hessel, Nogi S. Tangkilisan. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta : Grasindo
- Hilmi, Amirudin Zul. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 2006-2009*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.
- Khasanah, Nur L. 2014. *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. FEB UNDIP. Semarang
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. 2005. "Determinant of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities". *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Lesmana, S. I. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Liestiani, Annisa. (2008). *Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006*. Skripsi Sarjana. FE UI. Depok.
- Mardiasmo. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran. 2010. *Research Method of Bussiness*. United Kingdom. John Willey Ltd
- Simbolon, Harry Andrian. 2010. *Pengungkapan Laporan Keuangan*. Diakses melalui wordpress.com
- Suhardjanto, D., dan Lesmana, S.I. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia*. *Jurnal STIEBank BPD Jateng* Vol. 6 No.2. Surakarta
- Sumarjo, H. 2010. *Pengaruh karakteristik Pemda terhadap kinerja keuangan Pemda*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Syafitri, Febriyani. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok
- Syarifah, Leni Kania. 2014. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010*. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia